

MASALAH DISABILITAS DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI MALANG RAYA¹

Yohanes Subasno²

Abstrak

Attention to the issue of disability becomes more intense and widespread in Indonesia proven by a newlaw: Undang-Undang No. 8 Tahun 2016about Disabled Persons. The Study Program on Pastoral Ministry in its vision and mission speaks about empowering of persons with special needs by encouraging inclusive life.

As a lecturer of Community Based Rehabilitation and working together with Pilar Analisa Indonesia I did a survey on disability and social problems in Malang and its regency from July 22until August 5, 2016 using random sampling.

Results of this survey are: (1)Family, neighbours and public viewdisabled persons ranging from treating them like other persons to unhuman activities like hiding them. (2)The economic conditions of disabled persons are less or poor because of their disability and limited opportunities. (3)Government programsfor disabled persons cannot be felt by them.(4)The disability of disabled persons causes that they have low self-esteem and lack of confidence. (5) The availability of special facilities for disabled persons are very rarel found including public transportation accessibilities.

Keywords: Disability Issue, Community Opinion, Government Program, Special Facilities

¹Tulisan ini merupakan Laporan Hasil Penelitian Survey Kualitatif bersama Pilar Analisa Indonesia.

²Penulis adalahDosen Mata Kuliah Manajemen Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat,Program Studi Pelayanan Pastoral – STP IPI Malang.

Dalam beberapa bulan terakhir, masalah dan isu disabilitas telah menarik perhatian dan menjadi perbincangan yang luas lagi serius di Indonesia. Salah satu buktinya adalah disahkannya rancangan undang-undang tentang penyandang disabilitas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 15 April 2016 menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang yang terdiri dari 13 bab dan memiliki 153 pasal ini memberi perhatian secara khusus pada hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak itu meliputi hak akan hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Sebagai dosen untuk mata kuliah Manajemen Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat pada Program Studi Pelayanan Pastoral yang memiliki konsentrasi pada pemberdayaan bagi yang berkebutuhan khusus, atau dalam konteks yang sama adalah penyandang disabilitas maka isu-isu dan permasalahan disabilitas tidak luput dari perhatian kami. Dari segi lain, terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi melekat kewajiban bagi kami untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua darma tersebut kami lakukan melalui peran kami di PPRBM (Pusat Pengembangan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) di bawah Yayasan Bhakti Luhur di Malang

Bekerja sama dengan Pilar Analisa Indonesia dari Jember, kami melakukan penelitian survei dengan tema “masalah disabilitas dan sosial

kemasyarakatan” di Malang Raya yang meliputi Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Batu. Penelitian survei ini dilakukan mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 05 Agustus 2016 dengan metode random sampling mengacu kepada penghitungan secara kuantitatif. Hasil kuantitatif penelitian survey yang memotret tiga level responden penelitian yakni individu penyandang disabilitas, kelompok masyarakat dan institusi-institusi yang terkait dengan disabilitas, akan dimuat pada penerbitan jurnal SAPA edisi selanjutnya.

Selain melakukan survei kuantitatif dengan metode wawancara, survey juga memotret pengalaman dan informasi rekan-rekan enumerator atau surveyor mengenai kehidupan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas yang ada di Malang Raya. Metode wawancara dalam penelitian survey ini memberikan keleluasaan bagi rekan-rekan enumerator untuk mengamati, bertanya, dan menggali informasi sesuai dengan panduan yang termuat dalam instrumen penelitian yang sudah ada. Ada beberapa temuan menarik dari observasi yang dilakukan oleh para enumerator untuk mendapat perhatian. Berikut ini adalah 5 temuan masalah disabilitas dan sosial kemasyarakatan sebagai isu yang relevan dengan Program Studi Pelayanan Pastoral.

1. Perhatian atau pandangan keluarga, tetangga, dan masyarakat umum tentang Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang sengaja digunakan untuk mengganti kata cacat yang sejauh ini dinilai kurang pas bagi seorang yang mengalami cacat fisik dan mental. Secara umum dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan adanya persepsi dan perlakuan yang berbeda terhadap penyandang disabilitas. Secara umum, masih ditemukan

persepsi yang tidak seimbang terhadap penyandang disabilitas dalam masyarakat. Keberadaan penyandang disabilitas dianggap kurang bisa memberikan peran lebih dalam kegiatan yang membutuhkan orang banyak. Perlakuan ini muncul dari berbagai persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mulai dari masyarakat yang merasa kasihan sampai pada masyarakat yang memang secara sengaja memandangi mereka sebelah mata, sehingga cukup wajar ketika ada penyandang disabilitas tidak dilibatkan sama sekali dalam tata kehidupan di masyarakat.

Temuan menarik lainnya, ketika ada salah satu keluarga yang secara sengaja menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas, mereka tidak mengakui bahwa anggota keluarga mengalami disabilitas. Perlakuan ini tidak lepas dari bagaimana keluarga memandang kekurangan fisik atau mental sebagai aib keluarga. Dalam masyarakat, selain stereotipe yang negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas sebenarnya tidak sedikit tetangga atau masyarakat umum yang melihat dan memperlakukan mereka sama dengan masyarakat pada umumnya. Mereka berbaur dan bersosialisasi seolah tidak ada sekat yang membatasi. Situasi ini lebih diyakini sebagai kesadaran penuh, menguatkan, memberi rasa nyaman masyarakat terhadap keberadaan mereka. Kesadaran ini harus terus dipelihara dan disosialisasikan untuk mengangkat mereka dari persepsi negatif kepada hal-hal yang lebih positif. Cukup penting untuk mengapresiasi kehadiran masyarakat dengan persepsi dan perlakuan yang positif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk menguatkan dan memberikan semangat ditengah kekurangan yang mereka alami. Keberadaan mereka dengan gambaran tersebut, bukan berarti mereka (penyandang disabilitas) tidak butuh perhatian dan melupakan hak-hak

mereka. Sementara, pada masyarakat yang lain ternyata situasi ini tidak selalu ditemukan. Perasaan dikucilkan, diasingkan masih saja menjadi masalah tersendiri yang harus dihadapi. Dari temuan ini ada dua arus utama yang menjadi perhatian: pertama, bagaimana menumbuhkan semangat dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas; kedua, membangun kesadaran penuh keluarga, masyarakat, dan pemerintah terkait.

2. Kondisi Ekonomi Penyandang Disabilitas

Masalah ekonomi (kebutuhan pokok sehari-hari) menjadi persoalan umum yang dihadapi setiap individu dan masyarakat dimanapun dan pada level apapun. Mereka akan bersaing dan terus bisa memperbaiki kondisi ekonomi sesuai dengan kemampuan baik fisik maupun mental. Akan menjadi berbeda ketika mereka (penyandang disabilitas) tidak bisa ikut bersaing dan melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Hal ini berlaku pada sebagian besar penyandang disabilitas yang ada di Malang Raya. Sebagian besar kondisi ekonomi para penyandang disabilitas di Malang Raya masih di bawah garis kemiskinan. Ketatnya persaingan untuk mendapat pekerjaan dan kondisi fisik (mental) yang tidak memungkinkan menjadi faktor utama mereka tetap tidak beranjak dari garis kemiskinan. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penyandang disabilitas yang ditemui masih bergantung kepada bantuan keluarga dan orang lain. Temuan menarik di lapangan (Malang Raya) tidak ditemukan kehadiran pemerintah yang secara khusus mengangkat ekonomi para penyandang disabilitas. Mereka (pemerintah) masih bergerak pada level yang lebih umum. Kondisi ekonomi penyandang disabilitas di Malang Raya memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, baik di kota maupun di desa. Tidak ada

perbedaan yang mendasar antara penyandang disabilitas yang hidup di pedesaan maupun di perkotaan. Sementara, dilihat dari kondisi sosialnya, justru kehidupan sehari-harinya mereka yang hidup di kota lebih memprihatinkan daripada mereka yang hidup di pedesaan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan yang masih kental di pedesaan, sedangkan orang di perkotaan cenderung individualistik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas baik di kota maupun di desa adalah kelompok masyarakat yang layak diperhatikan dan mendapat bantuan secara khusus untuk mengangkat derajat hidup mereka.

3. Bagaimana Program pemerintah terhadap para penyandang disabilitas?

Apakah ada program khusus bagi penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kekurangan baik fisik maupun mental dalam kelompok masyarakat. Idealnya, mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah. Secara umum, pengamatan enumerator di lapangan tidak menemukan adanya program pemerintah yang secara khusus diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan pada level desa/kelurahan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas biasanya menjadi urusan Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Pemerintahan desa/kelurahan tidak memiliki program atau kegiatan yang secara khusus diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas. Salah satu tujuan dibentuknya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) seperti dimuat dalam <http://ww.mediapsmbl.org/PSM> adalah tertanganinya masalah sosial. mereka merupakan ujung tombak yang dimiliki Dinas Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak secara khusus menangani masalah penyandang

disabilitas; kegiatannya lebih bersifat umum. Kegiatannya lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami disabilitas ataupun masyarakat lain yang secara ekonomi masih memerlukan bantuan pemerintah. Program Keluarga Harapan dan Program keterampilan masih menjadi tugas pokok para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Apakah kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sudah sesuai dengan keinginan Dinas Sosial tentu perlu penelaahan lebih jauh, karena tulisan ini hanya mencoba mengidentifikasi program pemerintah yang paling mendekati segala hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bersifat umum menyebabkan penanganan dan perhatian secara khusus terhadap penyandang disabilitas tidak ditemukan. Cukup wajar ketika di lapangan ditemukan bahwa Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak memiliki data lengkap mengenai jumlah penyandang disabilitas. Mereka bergerak secara parsial. Bila tidak ada hal yang diperlukan atau keluhan dari masyarakat, maka Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tidak akan bergerak. Oleh karena itu, secara umum, perhatian atau program yang khusus bagi penyandang disabilitas di Malang Raya sangat minim untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penyandang disabilitas yang disusun dalam rapat paripurna pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2016, dengan sendirinya akan menjadi undang-undang sebulan sejak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya undang-undang ini diharapkan kedepan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan.

4. Penyandang Disabilitas memaknai hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Kondisi fisik dan mental yang tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi, bersekolah, dan bekerja membuat situasi mereka selalu terpinggirkan dalam masyarakat. Eric B. Shiraev dan David A. Levy (2012, 280) mengatakan ada kendala dalam proses bersosialisasi sebagai upaya yang ditempuh oleh individu menjadi anggota kultur tertentu dan menyerap perilaku serta nilai-nilai dari kultur itu. Keadaan ini memaksa penyandang disabilitas dan keluarga untuk keluar dari persepsi negatif. Akibatnya, muncul respon yang beragam dari penyandang disabilitas maupun dari keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merasa diasingkan, malu, tidak percaya diri, dan susah beradaptasi. Semuanya ini merupakan bagian yang selalu ditemui pada semua level penyandang disabilitas. Respon yang akhirnya menimbulkan keruwetan tersebut, merupakan proses internalisasi nilai atau pemaknaan penyandang disabilitas terhadap realitas sosial masyarakat yang dihadapi. Sebagaimana disampaikan oleh Peter L. Berger dan Luckman (1990,1),realitas sosial diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung pada kehendak individu. Kualitas realitas lingkungan masyarakat yang cenderung negatif atau acuh tak acuh terhadap keberadaan penyandang disabilitas menjadikan hidup mereka semakin berat. Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen dimana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya, sehingga menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk terus berada pada lingkungan masyarakat (realitas) yang positif . Karena, tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu berulang merupakan pola dari kegiatan

yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja.

Dalam observasi lapangan, penyandang disabilitas yang masih bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari cenderung lebih bisa untuk menerima persepsi masyarakat yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Situasi ini dapat terjadi pada masyarakat yang tidak terlalu memperlakukan jenis disabilitas (walaupun terkadang persepsi negatif masih ada). Sementara, untuk membuat penyandang disabilitas mampu memaknai kondisinya sebagai sesuatu yang baik dan tidak menghalangi mereka untuk bekerja ataupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, tentu butuh dukungan keluarga, tetangga, dan masyarakat. Dengan situasi ini, mereka (penyandang disabilitas) akan mampu memaknai dirinya dan hubungan sosialnya secara positif, walaupun dalam keseharian, mereka masih saja menemui kolega atau lingkungan yang masih berpikir negatif. Sebaliknya, pemaknaan positif para penyandang disabilitas akan sulit ditemukan ketika keluarga, tetangga, dan masyarakat masih menganggap bahwa penyandang disabilitas sebagai aib dan menghambat dalam kehidupan sosialnya. Tidak bisa dihindari bahwa prasangka sosial atau prasangka kelompok terhadap kelompok lain tetap ada di dalam masyarakat (Ahmadi 2007, 196). Hasil observasi yang menunjukkan adanya penyandang disabilitas yang dikucilkan oleh keluarga menjadi catatan tersendiri bagi berbagai pihak, lebih-lebih pemerintah daerah untuk membangun kesadaran masyarakat dan mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas.

5. Bagaimana ketersediaan fasilitas khusus penyandang disabilitas, baik alat bantu disabilitas di tempat umum dan di lembaga-lembaga pemerintah?

Seperti dilansir dalam “Akses Penyandang Disabilitas ke Fasilitas Umum Masih Buruk” (Megapolitan Kompas website 201), “Keterbatasan akses ke fasilitas publik, termasuk angkutan umum, salah satunya disebabkan infrastruktur yang tersedia belum ramah terhadap penyandang disabilitas”. Hal tersebut kongruen dengan hasil pengamatan dalam penelitian yang dilakukan di Malang Raya ini terkait dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas khusus penyandang disabilitas sangat jarang ditemui ditingkat kelurahan/desa maupun ditempat umum seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintah terkait. Fasilitas penyandang disabilitas pada transportasi umum pun sangat jarang ditemui bahkan bisa dibilang tidak ada. Keberadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas akan sangat membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas. Keberadaan fasilitas yang memadai selain memudahkan para penyandang disabilitas, keberadaannya juga akan dianggap sebagai pengakuan bahwa mereka juga diperhatikan oleh masyarakat dan khususnya oleh pemerintah. Secara tidak langsung keberadaan fasilitas juga akan bisa mengangkat derajat hidup mereka. Selain fasilitas umum yang minim, bantuan untuk alat bantu baik fisik maupun mental juga masih tidak ditemukan. Pelatihan dan keterampilan juga menjadi hal yang masih sulit didapatkan khusus untuk penyandang disabilitas. Situasi ini dapat menggambarkan bahwa fasilitas umum maupun bantuan apapun terkait penyandang disabilitas masih sangat diharapkan oleh mereka. Kondisi ekonomi yang serba kurang ditambah kebutuhan pokok yang mahal, alat kesehatan yang mahal, pendidikan yang mahal

menjadikan mereka sulit untuk berkembang. Oleh karena itu penting bagi kita, masyarakat umum, lembaga terkait, khususnya pemerintah daerah untuk terus memperhatikan mereka.

Kesimpulan

Secara umum, masalah penyandang disabilitas di Malang Raya masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah setempat. Dari hasil observasi lapangan, kehidupan penyandang disabilitas cukup memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai pada masalah sosial lainnya. Minimnya implementasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan penyandang disabilitas semakin membuat mereka tersisih dari kehidupan sosialnya. Perhatian kepada penyandang disabilitas bisa dimulai dari kebijakan untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang selama ini kegiatannya masih bersifat umum dan parsial. Penting untuk membangun persepsi bersama secara positif. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kepercayaan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosialnya.

REFERENSI KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, Abu. H. 2007. Psikologi Sosial (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas. 1990. Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES

“Akses Penyandang Disabilitas ke Fasilitas Umum Masih Buruk,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/30/16030011/.diakses4Oktober2016>

“Media PSM - TKSK,” <http://www.mediapsmbl.org/PSM>., diakses 3 Oktober 2016.

Shiraev, Eric B. dan Levy, David A. 2012. Psikologi Lintas Kultural. Jakarta: Kencana

“Teori Konstruksi Sosial dari Peter L Berger dan Thomas Lukcman,”<http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/.diakses4Oktober2016>